

**PENANGANAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN BARANG
PERSEDIAAN (*INVENTORY*) BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (1) DAN
(2) JO PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

(Studi di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

MIFTAKUL NURJAYANTI

NIM. 125010101111010



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data pribadi:

1. Nama lengkap : Miftakul Nurjayanti
2. Tempat, tanggal lahir : Madiun 1 januari 1994
3. Warga negara : Indonesia
4. Domisili : Madiun
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Menikah
7. Tinggi/berat badan : 155 cm/47 kg
8. Telepon : 085815443604
9. E-mail : mifthayanti47@gmail.com

Riwayat pendidikan:

1. 2000-2006 SD Negeri Puworejo 2 Kecamatan Kabupaten Madiun
2. 2006-2009 SMP Negeri 2 Kebonsari Kabupaten Madiun
3. 2009-2012 SMA Negeri 1 Dolopo Kabupaten Madiun
4. 2012- 2018 Universitas Brawijaya

Pengalaman Organisasi:

1. Staff Muda BEM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Terobosan Bocah-bocah Peduli Bangsa (TEROPONG)

Pengalaman Kepanitiaan

1. Brawijaya law fair 3 tahun 2012 sebagai HUMAS dan LO
2. Pagelaran Seni Teater Asap Malang 2014
3. Meet And Great Terry Radio MFm Malang 2015

PROFIL TIM PENGUJI

1. RACHMI SULISTYAWATI
2. RATIH
3. FITRI HIDAYAT
4. SHANTI RISKAWATI



LEMBAR PENGESAHAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi dunia semakin maju , banyak negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mencapai titik tertinggi ekonomi. Negara-negara di dunia khususnya negara-negara berkembang seperti negara yang berada di ASEAN sudah melakukan berbagai upaya untuk perkembangan dan kemajuan negaranya khususnya Negara Indonesia yang ada didalamnya. Dalam era yang sangat maju ini baik teknologi maupun perekonomiannya yang membuat berkembangnya suatu negara untuk berlomba-lomba mencapai puncak teratas peradaban, hal tersebut mempengaruhi seseorang untuk berusaha mengikutinya. Khususnya dalam dunia bisnis atau bidang ekonomi yang merupakan hal mendasar dalam kehidupan manusia, saat semua orang menginginkan hidupnya lebih sejahtera maka hal yang pertama kali dipenuhi adalah memiliki uang yang lebih untuk kelangsungan setiap kehidupannya, karena hal tersebut mendorong seseorang melakukan berbagai cara agar dapat mencapainya. Salah satu bentuk cabang suatu perjanjian yang dijadikan sebagai cara awal seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, maka tidak lain adalah perjanjian kredit .

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian dasar yang timbul dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat

KUHPerdata perlu juga tunduk pada asas-asas dan ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHPerdata.¹

Menurut R Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Sedangkan kredit menurut Rachmadi Usman, adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

Perjanjian kredit merupakan perikatan antara dua belah pihak atau lebih dimana perjanjian kredit menggunakan uang sebagai obyek dari perjanjian. Perjanjian kredit itu merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara Bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, dimana dalam perjanjian ini Bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana yang telah disepakati akan dikembalikan (dibayar) lunas. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini merupakan sesuatu yang abstrak, yang sulit diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan prestasi dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan selama beberapa tahun.⁴

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau perjanjian utama (prinsipil) yang sifatnya riil, arti riil ialah bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh Bank kepada

¹ Arini Faradinna.jurnal. **Perbandingan Kegiatan Sewa Guna Usaha Dan Pembiayaan Konsumen(Analisis Contoh Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Di Pt.Bca Finance Dikaitkan Dengan Pengaturan Mengenai Jaminan Fidusia)**, skripsi, fakultas hukum universitas Indonesia, Jakarta 2013

² Subekti, **Hukum Perjanjian**, Cet XXI, PT. Intermasa, Jakarta, 2005. hlm. 1.

³ Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum PerBankan Di Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm. 237

⁴ Eugenia Liliawati Muljono, **Tinjauan Yuridis Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh PerBankan**, Harvaindo, Jakarta, 2003 hlm. 8.

nasabah kreditur.⁵ Sebagaimana perjanjian kredit adalah perjanjian prinsipil, maka dalam sebuah perjanjian kredit diperlukan sebuah jaminan sebagai agunannya, dibuatlah kembali suatu perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan adalah assessornya atau sering disebut perjanjian yang sifatnya asessor (tambahan) dan ada atau berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian jaminan secara umum diatur dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana setiap kebendaan yang dimilikinya merupakan sebagai jaminan atas setiap hutang-hutangnya.

Dalam skripsi ini peneliti hanya mengfokuskan pada jaminan fidusia, fidusia sendiri merupakan suatu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁶ Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas kebendaan bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang khususnya bangunan yang tidak dibeBankan atas hak tanggungan.⁷ Jaminan dengan benda berwujud (materiil) yang berarti benda berwujud dapat berupa benda/barang bergerak dan atau benda/barang tidak bergerak. Sebagai contoh kendaraan bermotor merupakan salah satu obyek yang bisa dijadikan obyek jaminan yang bersifat agunan. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada Bank. Unsur-unsur agunan, yaitu sebagai Jaminan tambahan, diserahkan oleh debitur kepada Bank untuk mendapatkan fasilitas hutang.⁸ Peneliti melakukan penelitian ini di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut dimana Bank tersebut merupakan Perusahaan Daerah milik pemerintah Kabupaten Tulungagung.

⁵ Hermansyah, **Edisi Revisi Hukum PerBankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 71

⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Tentang Jaminan Fidusia

⁷ pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁸ Salim HS, , **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Cet.V, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 hlm.22

Dari data yang diperoleh beberapa nasabah atau debitur yang menjaminkan obyek jaminan fidusia yang cidera janji dalam hal ini adanya cidera janji yang bentuknya sebagai berikut

1. Berupa kredit macet atau dalam kategori tidak lancar berikut data yang ada:

Tabel 1.1

NAMA	PLAFOND	JAMINAN	KOLEK
debitur 1	4,500,000	roda dua merk honda tahun 2010 nomor bpkb h-03819xxx	2 kategori tidak lancar
debitur 2	15,000,000	roda dua merk yamaha tahun 2009 nomor bpkb f no.694xxx j,roda dua merk honda tahun 2014 nomor bpkb l-0537xxx	2 kategori tidak lancar
debitur 3	5,000,000	roda dua merk honda tahun 2009 nomor bpkb f 888xxx j	2 kategori tidak lancar

sumber data PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung kantor Kas Ngunut.

Keterangan:

- a. Plafond : besarnya pinjaman pokok yang telah disepakati
 - b. Jaminan : berupa kendaraan bermotor
 - c. Kolek : kategori atau kriteria kredit macet nasabah
2. Benda yang dijaminkan digadaikan kembali oleh Pemberi Fidusia.

Dalam Bank tersebut ditemukan adanya debitur penerima pinjaman telah terbukti menyalahi aturan dan perjanjian, dimana obyek yang telah dijadikan jaminan berupa kendaraan bermotor dijadikan sebagai bahan jaminan ke kreditur lain dalam hal ini adalah Bank kredit berjangka yang tidak bersertifikat secara resmi.

3. Adanya kredit macet yang mana benda *inventory* sebagai bahan jaminan.

Menurut data yang peneliti peroleh, ada salah satu debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 13 april 2006 dengan nilai plafond atau besar pinjaman sejumlah Rp,250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Perjanjian tersebut disertai dengan perjanjian tambahan yakni berupa jaminan fidusia. Obyek jaminan berupa kendaraan roda empat merek Toyota dan sejumlah benda *inventory* berwujud barang persediaan dari sebuah optik yang terletak disalah satu jalan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Namun dari perjanjian kredit tersebut ternyata debitur telah melakukan cidera janji dimana hutang yang seharusnya dibayar telah sering tidak dibayarkan selama kurang lebih 4 periode pembayaran lamanya. Menurut pasal 21 Undang-Undang Fidusia pemberi fidusia wajib mengganti jaminan fidusia.

Dari permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai permasalahan yang terdapat di poin ke tiga yakni mengenai adanya nasabah yang cidera janji. Namun dari kasus tersebut tidak hanya berhenti pada cidera janji saja permasalahan muncul ketika benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut merupakan barang persediaan (*inventory*).

Barang persediaan (*inventory*) merupakan sejumlah bahan-bahan, bagian-bagian yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi/produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau langganan setiap waktu.⁹ Barang persediaan (*inventory*) dapat dialihkan kepada pihak lain, selain itu terdapat pengecualian dimana barang persediaan tersebut tidak dapat

⁹ Freddy, Rangkuti. **Manajemen Persediaan Aplikasi di Bidang Bisnis**. PT. Raja grafindo Persada, Jakarta. 2007, hlm 1

dialihkan apabila si debitur melakukan cidera janji. Hal tersebut berdasarkan pasal 21 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 berbunyi: ¹⁰

- (1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan barang persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

Menurut pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa barang persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dialihkan oleh pemberi jaminan fidusia sepanjang pemberi fidusia tidak cidera janji atau yang sering disebut wanprestasi, apabila pemberi fidusia cidera janji dalam hal tidak melunasi hutangnya maka hasil obyek jaminan fidusia yang telah di alihkan atau dipindahkan tangankan adalah sebagai ganti atas obyek yang dijaminakan sebelumnya atau bisa digantikan dengan obyek lain sepanjang nilainya sama.

Pada permasalahan ini ketika pemberi fidusia cidera janji dan tidak bisa menyanggupi atas hutangnya maka pihak kreditur dalam hal ini adalah PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung berhak menyita obyek jaminan fidusia yang nilainya setara atau lebih dari nilai hutang debitur. Kreditur mempunyai hak untuk mengambil barang jaminan yang dijadikan jaminan hutangnya oleh debitur. Debitur wajib menyerahkan barang yang telah dijadikan jaminan karena berdasarkan pasal 1131 KUHPdata bahwa benda yang dimiliki merupakan jaminan atas hutang-hutangnya.

Berdasarkan kewajiban debitur untuk menyerahkan barang jaminannya pihak kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi obyek jaminan sesuai pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang berbunyi :

¹⁰ pasal 21 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Secara garis besar pengaturan proses eksekusi sita jaminan fidusia sudah tertera dalam pasal tersebut namun dalam proses pelaksanaannya masih banyak prosedur yang harus dilewati oleh Bank dalam eksekusi obyek jaminan. Pada saat eksekusi barang jaminan pihak debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan menyerahkan seluruh barang yang dijadikan obyek jaminan atas hutangnya. Permasalahan yang ada di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut adalah ketika pada saat eksekusi obyek jaminan pihak debitur tidak mampu memenuhi dan menyerahkan seluruh obyek jaminan, karena barang yang dijadikan obyek jaminan sebagian telah beralih kepada pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa pasal pasal 21 ayat 1 dan 2 Undang-

Undang Nomor 42 tahun 1999 masih belum mampu mengatur sepenuhnya para debitur yang melakukan cidera janji. Pihak kreditur juga belum mampu menangani debitur yang melakukan wanprestasi atas hutang-hutangnya dan penyerahan seluruh obyek jaminannya.

Terdapat beberapa karya ilmiah yang mempunyai pokok bahasan yang mirip dengan penelitian penulis. Dibawah ini diuraikan pembeda antara karya tulis / penelitian ini dengan karya lainnya yang telah ditulis sebelumnya:

Tabel. 1.2

NO	NAMA	FAKULTAS / UNIVERSITAS/ JURNAL	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KETERANGAN PEMBEDA
1	Avizhena Akbar Hersanto	Fakultas hukum / universitas muhammadiyah yogyakarta 2017	Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Pd Bpr Bank Purworejo	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi PD BPR Bank Purworejo dalam hal Debitur Melakukan Keterlambatan Pembayaran Kredit, Kredit Macet, dan/atau Menggadaikan Benda Jaminan pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan?	Peneliti sebelumnya di dalam skripsinya berbicara Perlindungan Hukum Bagi PD BPR Bank Purworejo dalam hal Debitur Melakukan Keterlambatan Pembayaran Kredit, Kredit Macet, dan/atau Menggadaikan Benda Jaminan pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan,

					sedangkan dalam penelitian skripsi ini peneliti memaparkan dan mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan pasal 21 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang pengalihan obyek jaminan fidusia berupa barang <i>inventory</i> jo pasal 29 terkait dengan proses eksekusi dan penjualan obyek sita jaminan fidusia dalam perjanjian kredit tersebut?
2	Muhammad Azwar Anas	fakultas hukum universitas muria kudu 2017	fidusia sebagai jaminan dalam pemberian kredit dan akibat hukumnya dalam hal terjadi wanprestasi pada pd.bpr bkk kudu	1.Bagaimana Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada BPR BKK Kudus 2.Apa Saja Akibat Hukum dan Upaya yang dilakukan BPR terhadap barang jaminan yang dibebani jaminan fidusia dalam hal terjadi wanprestasi	Penelitian terdahulu fokus kepada pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia serta akibat hukumnya sedangkan dalam penelitian skripsi ini peneliti memaparkan

					dan mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan pasal 21 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang pengalihan obyek jaminan fidusia berupa barang <i>inventory</i> jo pasal 29 terkait dengan proses eksekusi dan penjualan obyek sita jaminan fidusia dalam perjanjian kredit tersebut
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah di jelaskan diatas maka peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan debitur wanprestasi dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut?
2. Apa hambatan-hambatan dan upaya di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut dalam proses eksekusi sita jaminan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan penanganan debitur wanprestasi dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut dalam proses eksekusi sita jaminan dan penjualan obyek sita jaminan

D. MANFAAT PENELITIAN

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum berupa:
 - a. Memberikan masukan bagi para teorisi atau bagi orang yang ingin memperdalam dan mengembangkan atau menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai hukum perdata buku iii kuhperdata tentang perjanjian
 - b. Memberikan masukan pengetahuan baru yang bersifat edukatif. Dengan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai sistem hukum serta merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin ilmu lain .
 - c. merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum
 - d. memberikan masukan bagi perkembangan asas-asas umum hukum dan membantu dalam sumbangan bagi doktrin
 - e. Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata bisnis.

2. Manfaat Praktis ditujukan kepada beberapa pihak yakni sebagai berikut:
 - a. Bagi pembuat kebijakan diharapkan menambah wawasan baru dalam penentuan sebuah kebijakan khususnya di dunia perbankan dan jaminan.
 - b. Bagi dunia usaha atau industri menjadi salah satu rujukan dalam proses pengajuan kredit dalam pengembangan perusahaan dan bisnisnya
 - c. Bagi pihak Bank atau debitur dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pelayanan, agar tidak terjadi masalah-masalah yang timbul seperti yang dijelaskan dalam skripsi ini
 - d. Bagi pihak debitur dengan skripsi ini diharapkan sebagai rujukan dalam pemecahan masalah ditingkat operasional di perusahaan khususnya masalah penanganan kredit bermasalah.
 - e. Bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitian diharapkan menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang bisnis dan perbankan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

1) BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi tentang:

- 2) Latar Belakang Di dalam latar belakang memuat beberapa ketentuan dan alasan penulis untuk mengadakan penelitian ini.
- 3) Rumusan masalah Didalam rumusan masalah terdapat pertanyaan apa yang menjadi pokok bahasan penelitian .
- 4) Manfaat penelitian Manfaat penelitian ditujukan untuk beberapa subyek hukum diantaranya adalah bagi praktisi, Bagi aparat penegak hukum, bagi praktisi, serta bagi pemerintah indonesia sendiri.

2) BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang pustaka-pustaka sebagai dasar atau acuan atau landasan untuk menganalisis hasil yg diperoleh dalam pelitian ini.

3) BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan mengulas secara terinci mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Dalam bab ini berisi tentang hal-hal berikut ini:

1. Jenis penelitian
2. Pendekatan Penelitian,
3. Jenis data
4. Teknik Penelusuran data
5. Teknik Analisis data
6. Populasi dan sampling

4) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini dimana data yang diperoleh adalah data yang telah dikumpulkan selama periode pelaksanaan penelitian skripsi ini.

5) BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang pemaparan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab

pendahuluan. Kemudian pada bab ini peneliti juga akan memberikan saran terkait penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Teori Tentang Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga¹. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum, menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.² kepastian hukum tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu, aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di luar negara.³

Perlindungan terhadap warga negara memang terletak pada negara, jika negara itu mengakui adanya konsep *Rechtstaat*. Dalam konsep ini, suatu negara

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, ed.ke-3 cet.ke-1. Yogyakarta.Liberty. 2007 Hlm 34

² Op cit Mertokusumo hlm 199

³ Manullang, E.Fernando , *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Penerbit Kompas, Jakarta. 2007 hlm 94

dianggap menganut prinsip *Rechtstaat*, apabila dalam penyelenggaraan negara itu dilakukan menurut hukum, yang dituangkan dalam konstitusi.⁴ Apabila ada sekelompok pihak di luar negara yang mempunyai kekuasaan dan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang, negaralah yang pertama-tama bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, karena negara adalah subjek yang mendapat perintah dari konstitusi dan hukum untuk melaksanakan kepentingan umum menurut hukum yang baik.

Dengan adanya negara dan hukum (konstitusi) yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bersama rakyat yang berdaulat, oleh sebab itu nilai kepastian yang berkaitan dengan hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjalankannya. Di sinilah letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan peranan negara terlihat.⁵

B. Kajian Umum Tentang Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeenkomst* tersebut lazim

⁴ Ibid Manullang

⁵ Op cit Manullang hlm 95

diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervinten* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *oevereekomst*.⁶ Serta dalam sebuah perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain :⁷

- a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang. Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.
- b. Adanya persetujuan atau kata sepakat. Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.
- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna

⁶ R Setiawan, **Pokok Pokok Hukum Perikatan**, Putra Abardin, Bandung, 1999. hlm.1.

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm . 92.

kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

- d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan. Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.
- e. Adanya bentuk tertentu. Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.

- f. Adanya syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian

C. Kajian Umum Tentang Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagaimana perjanjian kredit adalah perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada atau berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh Bank kepada nasabah kreditur.⁸

Adapun beberapa asas dalam perjanjian kredit yang harus dipatuhi oleh para pihak yakni sebagai berikut:

- a. Asas Pacta Sunt Servada . Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata , yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa mereka belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari asas pacta sunt servada adalah perjanjian tiak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah

⁸ Hermansyah, 2009, **Edisi Revisi Hukum PerBankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 71

pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

- b. Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya suatu syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan bahwa perjanjian tersebut telah dilahirkan pada saat telah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan begitu, suatu perjanjian telah sah ketika syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut telah dipenuhi dan lahir ketika para pihak telah mengucapkan kata sepakat.
- c. Asas Itikad Baik. Dalam KUHPerdara pada Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa : “perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”. Dengan kata lain, 29 setiap orang atau badan hukum (subyek hukum) yang ingin mengadakan perjanjian harus mempunyai itikad baik. Itikad baik di sini merupakan suatu bentuk perlindungan untuk memberikan perlindungan hukum bagi salah satu pihak yang mempunyai itikad baik dalam perjanjian baik dalam waktu pembuatan perjanjian maupun pada waktu pelaksanaan perjanjian.
- d. Asas Kepribadian. Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini

mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1337 KUHPerdata yaitu, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.

- e. Asas Kebebasan Berkontrak. Hal ini menjelaskan bahwa, setiap subyek hukum mempunyai kebebasan dalam mengadakan suatu bentuk perjanjian apa saja maupun perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan ini mengasumsikan bahwa adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak adalah begitu esensial, baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi dan didalam lalulintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya, maupun bagi masyarakatnya sebagai suatu kesatuan, sehingga hal-hal tersebut oleh beberapa peneliti dianggap sebagai suatu hak dasar.⁹

D. Kajian Umum Tentang Penanganan Kredit Macet

⁹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, , **Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern**, PT Refika Aditama, Bandung, 2004 Hlm. 99.

Kredit bermasalah sendiri merupakan suatu kondisi dimana debitur mengingkari janjinya membayar bunga dan / atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Karena hal tersebut upaya penanganan kredit bermasalah penting untuk dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut. Upaya penanganan kredit bermasalah itu sendiri dibagi menjadi dua yakni dengan melakukan upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.

Penyelamatan kredit bermasalah sendiri diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia no. 26/4/bppp tanggal 19 mei 1993. Penyelamatan kredit bermasalah diantaranya sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Upaya penyelesaian kredit bermasalah ada beberapa cara yakni sebagai berikut:

- a. Penagihan atau penarikan kembali Merupakan salah satu cara yang dilakukan pihak kreditur untuk mendapatkan semua pemenuhan atas hutang debitur. Upaya ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni sebagai berikut penagihan langsung dengan mempergunakan bantuan jasa biro penagihan untuk dan atas nama bank, serta pihak biro harus terafiliasi sesuai pasal 1 UUP bab 16, dan pasal 1792-1819 KUHP dan Putusan mahkamah agung republik indonesia terkait dengan gugatan debitur atas penggunaan debt collector oleh bca
- b. Iklan surat kabar, pengumuman penagihan hutang dengan melalui pengumuman di surat kabar.
- c. Penagihan kepada penjamin, penagihan ini dilakukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang sebelumnya telah bekerja sama dengan pihak bank sebagai penyedia jasa pinjaman hutang.
- d. Parate eksekusi, dilakukan dengan berdasarkan hak peletakkan sita jaminan dan dalam hal ini Bank, menjual obyek jaminan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan umum tersebut.
- e. Penarikan kredit melalui proses pengadilan.
- f. Penyitaan jaminan. Dilakukan setelah adanya proses lelang umum obyek jaminan yang dilaksanakan berdasarkan pengajuan permohonan lelang dan

atau/ setelah obyek jaminan telah disepakati untuk dilakukan penjualan langsung.

- g. Penghapus-bukuan. Hal ini juga dilakukan setelah adanya proses lelang umum obyek jaminan yang dilaksanakan berdasarkan pengajuan permohonan lelang dan atau/ setelah obyek jaminan telah disepakati untuk dilakukan penjualan langsung. Namun dalam hal ini pihak debitur telah melakukan pelunasan hutang melalui penyerahan obyek jaminan sebagai pelunasan hutangnya.

E. Kajian Umum Tentang Hukum Jaminan

- a. Pengertian hukum jaminan

Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang dari seseorang.¹⁰

- b. Ruang lingkup hukum jaminan

Berbicara mengenai hukum jaminan maka telah diatur dalam undang-undang yang ada mulai dari KUHPerdara, KUHD sampai undang-undang diluar KUHPerdara dan KUHD yakni Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok agraria, Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Undang-undang No 42 tahun 1949 Tentang Fidusia Undang-undang no 21

¹⁰ J. Satrio, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3

Tahun 1992 Tentang pelayaran. serta adanya Pengutamaan dan klasifikasi pasal 1131 sampai dengan pasal 1149 KUHPerdara terkait tentang lembaga jaminan hukum jaminan dan benda-benda yang dijaminan serta hak-hak yang didahulukan. Menurut dari beberapa kriteria maka ada beberapa hak yang dapat didahulukan yakni sebagai berikut:

a) Piutang dengan Hak Didahulukan pada Umumnya

1. Pasal 1133 Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini.
2. Pasal 1134 Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.

b) Menurut hak krediturnya yakni tingkatannya diatur menurut sifat hak didahulukan mereka.

1. Pasal 1136 Para kreditur dengan hak didahulukan yang mempunyai tingkatan sama, dibayar secara berimbang.
2. Pasal 1137 Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan. Ini merupakan kreditur sparatis.

3. Pasal 1138 Hak-hak istimewa itu dapat mengenai barang-barang tertentu, atau dapat juga mengenai semua barang-barang bergerak dan tak bergerak, pada umumnya. Yang pertama didahulukan daripada yang kedua.

c) Hak didahulukan yang dilekatkan pada barang tertentu

1. Pasal 1139

Piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah:

1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;
2. uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu;
3. . dibayar;
4. biaya untuk menyelamatkan suatu barang;
5. biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya;
6. apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan;
7. upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;
8. apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur;

9. penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

2. Pasal 1142

Pihak yang menyewakan dapat menyita barang-barang bergerak, yang atasnya ia mempunyai hak didahulukan menurut Pasal 1140, bila barang itu diangkut tanpa izinnya, dan ia tetap mempunyai hak didahulukan atasnya, sekalipun barang itu terikat pada pihak ketiga, karena digadaikan, atau karena soal lain, asalkan ia menuntutnya lewat pengadilan dalam waktu empat puluh hari setelah barang bergerak yang diperuntukkan bagi perkebunan diangkut, atau dalam waktu empat belas hari sejak saat diangkutnya barang perhiasan sebuah rumah.

3. Pasal 1143 Hak didahulukan pihak yang menyewakan meliputi segala uang sewa yang sudah dapat ditagih selama tiga tahun terakhir dari tahun yang berjalan.
4. Pasal 1144 Penjual barang bergerak yang belum mendapat pelunasan dapat melaksanakan hak didahulukan atas uang pembelian barang itu, bila barang-barang itu masih berada di tangan debitur, tanpa memperhatikan apakah ia telah menjual barang-barang itu dengan tunai atau tanpa penentuan waktu.
5. Pasal 1145 Bila penjualan barang itu dilakukan dengan tunai, maka penjualan mempunyai wewenang untuk menuntut kembali barang-barangnya, selama barang-barang itu masih berada ditangan pembeli, dan menghalangi dijualnya barang itu lebih lanjut, asalkan penuntutan kembalinya barang itu dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penyerahannya.
6. Pasal 1146 Namun penjual itu tidak dapat melaksanakan haknya lebih dahulu daripada orang yang menyewakan rumah atau perkebunan itu, kecuali bila dapat dibuktikan bahwa yang menyewakan itu tahu, bahwa

perabot-perabot rumah itu dan barang lainnya yang diperuntukkan bagi rumah atau kebun itu, tidak dibayar oleh si penyewa itu.

7. Pasal 1146a Hak penjual hapus, bila barang-barang itu, setelah berada dalam penguasaan pembeli semula atau kekuasaanya, dibeli dengan itikad baik oleh pihak ketiga dan telah diserahkan kepadanya. Akan tetapi bila uang pembelian itu belum dibayar oleh pihak ketiga itu, penjual semula dapat menuntut uang itu sampai memenuhi jumlah tagihannya, asalkan tagihan itu dilakukan dalam waktu enam puluh hari setelah penyerahan semula.
8. Pasal 1147 Hak-hak didahulukan yang tercantum dalam Pasal 1139 nomor 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dilaksanakan sebagai berikut:
yang tersebut pada nomor 4, atas barang yang untuk penyelamatan telah dikeluarkan biaya;
yang tersebut pada nomor 5, atas barang yang telah digarap;
yang tersebut pada nomor 6, atas barang-barang yang telah dibawa ke rumah penginapan oleh tamu rumah penginapan;
yang tersebut pada nomor 7, atas barang-barang yang diangkut;
yang tersebut pada nomor 8, atas hasil dan penjualan persil yang telah dibangun, ditambah atau diperbaiki;
yang tersebut pada nomor 9, atas jumlah yang dijamin oleh pegawai termaksud, dan bunga yang belum dibayar untuk itu.
9. Pasal 1148 Jika beberapa kreditur dengan hak didahulukan seperti yang tercantum dalam bagian ini muncul bersama, maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan barang itu mendapat hak didahulukan, bila biaya itu dikeluarkan setelah timbul utang-utang lain yang mempunyai hak didahulukan.

d) Hak didahulukan atas segala barang bergerak dan barang tetap pada umumnya

Pasal 1149 Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini:

1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
2. biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk mengurangnya, bila biaya itu berlebihan;
3. segala biaya pengobatan terakhir;
4. upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahunberjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri";
5. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
6. piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;

7. piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.

c. Macam-macam hukum jaminan

Jaminan dibedakan menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang lahir karena undang-undang hal ini berdasarkan pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata, jaminan yang lahir karena undang-undang yang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang-undang tanpa ada perjanjian para pihak. Sedangkan jaminan khusus merupakan jaminan yang lahir karena perjanjian. Perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian tambahan yang melekat pada perjanjian hutang piutang diantara debitur dan kreditur. Jaminan khusus sendiri dibagi kembali menjadi dua diantaranya adalah jaminan perorangan (*borgtocht*) dan jaminan kebendaan. Berdasarkan pasal 1820 KUHPerdata perjanjian jaminan berdasarkan perorangan merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang (kreditur), mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang (debitur) manakala orang itu sendiri (debitur) tidak memenuhinya (*wanprestasi*). Jaminan khusus yang termasuk jaminan kebendaan sendiri diantaranya sebagai berikut:

1. Jaminan hak tanggungan berdasarkan UU Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996
2. Jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999
3. Gadai berdasarkan pasal 1150 KUHPerdata
4. Hipotek berdasarkan pasal 1162 KUHPerdata

F. Kajian Umum Tentang Jaminan Fidusia Dan Lembaga Jaminan Fidusia

a. Pengertian fidusia

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan barang tertentu dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap menjadi penguasaan pemilik barang. Hal ini diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

b. Pengertian jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

c. Pengertian lembaga jaminan fidusia

Lembaga jaminan fidusia adalah lembaga penjamin yang menjamin hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

G. Pengertian Debitur Dan Kreditur

- a. Pengertian debitur Dalam Pasal 1 angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, debitur mempunyai pengertian yaitu pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur disini berarti perorangan yang memperoleh fasilitas penyediaan dana. Penyediaan dana adalah kredit atau dapat dipersamakan seperti itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹¹ Adapun pengertian lain tentang debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan

¹¹ (Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007) Suwanto, Erlina Dayanti, Pembangunan Database Terpadu Berbasis Web Untuk Menyediakan Informasi Debitur Bagi PD. BPR/PK Sekabupaten Indramayu, Jurnal Online ICT- STMIK IKMI Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011, hlm. 19

dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran. Terkait dengan uraian diatas tersebut, Debitur merupakan pihak atau orang, badan hukum yang memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak lain (kreditur) yang mana kewajibanya tersebut memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya. Adapun kewajiban Debitur tersebut berupa pembayaran yang harus dilaksanakannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan para pihak Dalam perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak antara debitur dan kreditur yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

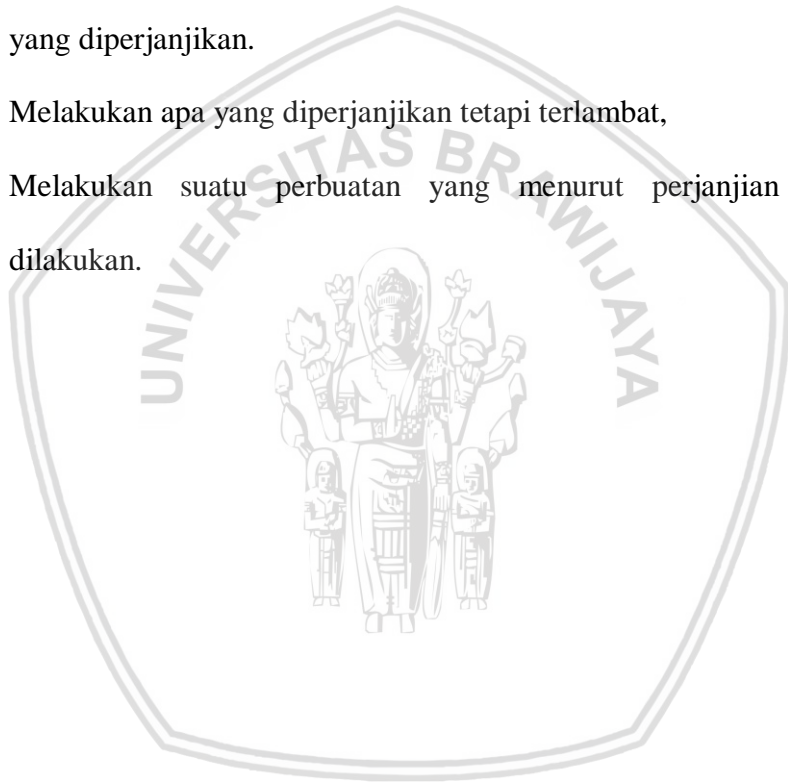
- b. Kreditur menurut undang-undang fidusia pasal 1 angka 8 bahwa Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

H. Pengertian Wanprestasi Atau Cidera Janji

Wanprestasi atau cidera janji sering terjadi dan dilakukan oleh subyek hukum, hal yang sering dikaitkan dengan cidera janji adalah ketika seseorang berutang kepada orang lain dan orang tersebut tidak membayar hutangnya atau tidak menyanggupi hutangnya kepada orang tersebut. Cidera janji merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena melanggar

ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang baik undang-undang perdata maupun pidana. Suatu perbuatan bisa dikatakan Cidera janji jika memenuhi atau masuk dalam beberapa perbuatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.



I. Kajian Umum Tentang Pendaftaran Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka dapat dijelaskan bahwa :¹²

Pasal 12

(1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

(2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden

Pasal 13

(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

(2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

¹² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

J. Kajian Umum Mengenai Asas-Asas Dalam Jaminan Fidusia

a. Asas publicitet

merupakan asas yang menyatakan bahwa semua hak harus disaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran

fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia pada kantor departemen kehakiman dan hak asasi manusia.

b. Asas specialitet

merupakan asas yang menerangkan bahwa hak fidusia hanya dapat disebabkan atas percil atau barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

c. Asas tak dapat dibagi-dibagi

menerangkan bahwa asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dibaginya suatu hak jaminan, walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

K. Kajian Umum Tentang Barang Persediaan (*inventory*)

Berbagai rumusan tentang definisi persediaan telah banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya definisi yang dikemukakan oleh Starr dan Miller yang menyatakan bahwa persediaan adalah suatu sumber daya yang menganggur (*idle resources*), akan tetapi sumber daya tersebut mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomis persediaan timbul karena sumber daya tersebut diperoleh dengan suatu pengorbanan dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Definisi lain menyatakan bahwa pada dasarnya persediaan adalah suatu sumber daya menganggur (*idle resources*) yang menunggu proses lebih lanjut. Yang dimaksud proses lebih lanjut di sini dapat berupa kegiatan produksi seperti yang dijumpai pada sistim industri, kegiatan pemasaran seperti dijumpai pada

sistim distribusi ataupun kegiatan konsumsi seperti dijumpai pada sistim rumah tangga.¹³

a. Jenis-Jenis Persediaan

Pembagian jenis persediaan dapat berdasarkan proses manufaktur yang dijalani dan berdasarkan tujuan. Berdasarkan proses manufaktur, maka persediaan dibagi dalam tiga kategori, yaitu :¹⁴

1. Persediaan bahan baku dan penolong.
2. Persediaan bahan setengah jadi.
3. Persediaan barang jadi.

Pembagian jenis persediaan berdasarkan tujuannya, terdiri dari

1. Persediaan pengaman (*safety stock*) Persediaan pengaman (*safety stock*) adalah persediaan yang dilakukan untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Apabila persediaan pengaman tidak mampu mengantisipasi ketidakpastian tersebut, akan terjadi kekurangan persediaan (*stock out*).

Faktor-faktor yang menentukan *safety stock*:

- a. Penggunaan bahan baku rata-rata Salah satu dasar untuk memperkirakan penggunaan bahan baku selama periode tertentu,

¹³ Arman Hakim Nasution, dan Yudha Prasetyawan, **Perencanaan Dan Pengendalian Produksi**, Guna Widya, Surabaya, 2008, hlm 1

¹⁴ Agus Ristono, **Manajemen Persediaan**, edisi 1. Graha Ilmu. Yogyakarta .2009. hlm 11

khususnya selama periode pemesanan adalah rata-rata penggunaan bahan baku pada masa sebelumnya.

- b. Faktor waktu atau *lead time (procurement time)* Lead time adalah lamanya waktu antara mulai dilakukannya pemesanan bahan-bahan sampai dengan kedatangan bahan-bahan yang dipesan tersebut dan diterima di gudang persediaan. Lamanya waktu tersebut tidaklah sama antara satu pesanan dengan pesanan yang lain, tetapi bervariasi.
2. Persediaan antisipasi Persediaan antisipasi disebut sebagai *stabilization stock* merupakan persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang sudah dapat diperkirakan sebelumnya.
3. Persediaan dalam pengiriman (*transit stock*) Persediaan dalam pengiriman disebut *work-in process stock* adalah persediaan yang masih dalam pengiriman, yaitu:
 - a. *Eksternal transit stock* adalah persediaan yang masih berada dalam transportasi.
 - b. *Internal transit stock* adalah persediaan yang masih menunggu untuk diproses atau menunggu sebelum dipindahkan.

L. Kajian Umum Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

Kajian umum mengenai eksekusi jaminan fidusia telah jelas diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 yakni dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 29

(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

2. Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

3. Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jamiman Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

5. Pasal 33

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

6. Pasal 34

(1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

M. Kajian Umum Tentang Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah adalah suatu produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggaraan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Perusahaan

daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah.¹⁵ Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 177 menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang 12 pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



¹⁵ Dikutip dari *e-jurnal* <http://digilib.unila.ac.id/8270/3/BAB%202.pdf> diakses 13 januari 2018 pukul 9.00 wib

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris untuk mendeskripsikan penanganan debitur yang cidera janji dimana jaminan berupa barang persediaan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Serta untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dan upaya kreditur dalam hal ini Bank dalam proses eksekusi sita jaminan dan penjualan obyek sita jaminan sebagai bentuk penyelesaian kredit macet dari debitur wanprestasi. Pendekatan yuridis empiris ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang didapatkan di lapangan.¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian empiris ini adalah yuridis sosiologis, dimana dalam sosiologis mengkaji permasalahan dan proses penanganan masalah yang diteliti mengenai proses pelaksanaan pasal 21 ayat 1 dan 2 jo pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia di kantor PD BPR Bank Daerah Tulungagung Kantor Kas Ngunut.

¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm 10

C. Alasan Pemilihan Lokasi

1. Lokasi

Lokasi yang dijadikan studi dalam penelitian ini adalah PD. Bank Pengkreditan Rakyat Kabupaten Tulungagung.

2. Alasan

Karena dikawasan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang pertumbuhan ekonomi kurang maju sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal suatu usaha dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Tulungagung oleh sebab itu masyarakat sangat banyak melakukan peminjaman dana ke Bank Pengkreditan Rakyat Daerah Kab.Tulungagung dan tentunya banyak sekali masyarakat yang menunggak pembayaran hutang bahkan tidak menyanggupi pelunasan hutang. Karena hal tersebut peneliti menemukan salah satu permasalahan yang muncul ketika debitur atau nasabah penerima pinjaman yang menjaminkan barang-barang persediaannya dari suatu produksinya melakukan cidera janji dengan tidak membayarkan hutangnya dan tidak menyerahkan seluruhnya obyek jaminannya, hal itu sangat bertentangan dengan undang-undang dan asas-asas dalam suatu perjanjian. Khususnya pasal 21 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 dan asas-asas dalam hukum perjanjian.

D. Jenis Data

Jenis data hukum dalam penelitian empiris terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. data primer adalah data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan atau langsung dari sumbernya dengan melakukan studi lapangan dengan melalui wawancara kepada pihak kreditur yakni PD.BPR Bank Daerah Tulungagung Kantor Kas Ngunut
2. Sedangkan data sekunder dalam penelitian empiris adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber data yang diteliti. Sumber data sekunder antara lain arsip daftar debitur, dan perjanjian, surat-surat pemberitahuan dan surat-surat peringatan dari kreditur kepada debitur.

E. Teknik Memperoleh Data

Data primer dalam penelitian hukum empiris ini dapat diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber/responden/informan kunci, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan quisioner maupun pedoman wawancara, pengamatan tidak terlibat atau terlibat.²

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berkas-berkas penting

² Buku Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015.

repository.ub.ac.id

dari PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut. Serta dari berbagai sumber penelusuran di internet dan Koran.

F. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu. populasi dari skripsi ini meliputi lembaga dan badan terkait dalam hal ini PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut dalam kawasan atau wilayah di Kabupaten Tulungagung khususnya di kecamatan ngunut Kabupaten Tulungagung dalam periode mulai bulan januari tahun 2018 hingga selesai.
- b. Sampel adalah bagian yang mewakili populasi. Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling. teknik smpling yang digunakan adalah Sampling Purposive dengan Cara penentuan sampel yang yang ditentukan berdasarkan studi wawancara dan penarikan data dari quisioner maupun wawancara terstruktur yang telah dibagikan kepada pelaksana operasional di kantor Bank daerah Kabupaten Tulungagung. dalam hal ini adalah
 - 1) Kepala pusat PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung

- 2) Kepala PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut
- 3) Tim legal PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut yang terdiri dari Notaris, Kuasa Hukum, Kejaksaan

G. Teknik Analisa data

Teknik analisis data adalah cara untuk mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh dari penelitian secara ilmiah. Teknik analisis data dalam penelitian empiris dapat menggunakan tabel-tabel tunggal maupun tabel ganda dapat dilakukan untuk mendeskripsikan data, agar memudahkan menganalisis dan mengambil kesimpulan. Demikian pula analisis data kualitatif digunakan untuk hasil wawancara,

H. Definisi Operasional

a. Penanganan Debitur Wanprestasi

Penanganan debitur wanprestasi merupakan suatu upaya kreditur dalam menangani kredit bermasalah yang dilakukan oleh debitur. Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Karena hal tersebut maka perlulah suatu tindakan untuk menyelamatkan dan menyelesaikan debitur yang melakukan wanprestasi.

b. Barang Persediaan (*Inventory*)

Barang persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan, bagian-bagian yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam

perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi/produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau langganan setiap waktu. Yang dimaksud barang persediaan dalam penelitian ini berupa alat-alat, bahan produksi setengah jadi, dan barang produksi yang sudah jadi dari sebuah produsen kaca mata dari toko optik.

c. Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.” Dimana ayat 1 menerangkan bahwa barang persediaan yang dijadikan jaminan bisa dialihkan maka penelitian menjelaskan bahwa barang persediaan tersebut tidak bisa dialihkan jika debitur cidera janji.

d. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Dalam pasal tersebut berbicara mengenai eksekusi sita jaminan fidusia, dimana jika dikaitkan dengan penelitian ini maka eksekusi sita jaminan melalui beberapa tahapan dimana obyek jaminan adalah barang persediaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kabupaten Tulungagung

1. Kondisi Geografis Kabupaten Tulungagung

Batas-batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara administratif adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara: Kabupaten Kediri
- b) Sebelah selatan: Samudera Hindia
- c) Sebelah timur: Kabupaten Blitar
- d) Sebelah barat: Kabupaten Trenggalek

Secara topografi, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 meter diatas permukaan laut. Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan wilis Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 meter. Di tengah Kota Tulungagung,

terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian: utara dan selatan. Kali ini sering disebut dengan Kali Parit Raya dari rangkaian Kali Parit Agung.

b. PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut.

PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Merupakan suatu perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berdomisili di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan untuk kantor kasnya sendiri tersebar di beberapa daerah kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung salah satunya adalah kantor kas yang ada di kecamatan ngunut. Kantor kas yang ada di kecamatan ngunut ini merupakan tempat yang menjadi study dalam penulisan skripsi ini, yang mana kantor kas tersebut terletak di jalan tulungagung-blitar Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

B. Penanganan Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Barang Persediaan (*Inventory*) di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut.

Pasal 21 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 terkait dengan pengalihan hak suatu obyek yang menjadi jaminan hutang dimana pasal tersebut berbunyi:

- 1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan barang persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

Larangan Jaminan Fidusia menurut Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan barang persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

- a) Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
- b) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan barang persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

pada dasarnya suatu obyek yang dijadikan jaminan fidusia tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan hal ini sesuai dengan asas-asas dasar dari hukum jaminan. Asas-asas dalam jaminan pada umumnya menyebutkan bahwa suatu obyek yang telah dijadikan jaminan tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat

dialihkan atau dipindahtangankan, namun jika kita melihat pasal tersebut maka ada pengecualian dan bertentangan dengan asas-asas tersebut seperti pada pasal 21 dan pasal 23 undang-undang fidusia tersebut suatu obyek jaminan fidusia dapat dialihkan atau dipindahtangankan apabila obyek tersebut berupa barang persediaan (*inventory*), selanjutnya menurut ketentuan pasal 21 ayat 2 yang menyebutkan bahwa barang persediaan tidak dapat dialihkan lagi apabila debitur melakukan cidera janji atau sering disebut wanprestasi. Karena hal tersebut maka pihak kreditur berhak melakukan suatu tindakan hukum untuk menanganinya. Suatu Penanganan debitur wanprestasi merupakan hal yang sering dilakukan oleh kreditur dalam hal ini adalah Bank sebagai upaya penyelamatan kreditur dari kerugian. Wujud dari wanprestasi itu sendiri bermacam-macam dan membutuhkan penanganan khusus yang berbeda-beda dalam setiap wujud perbuatan wanprestasinya. Wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Wujud dari wanprestasi tersebut bermacam-macam diantaranya adalah sebagai berikut :¹

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

¹ R.Subekti, **Hukum Perjanjian** Cet.ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970, hlm 50

Perbuatan wanprestasi ini merupakan suatu perbuatan yang telah jelas dilarang oleh undang-undang yakni **Pasal 1238 KUHPerdara** yang berbunyi si berutang adalah lalai , apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akata sejenis itu telah dinyatakan lalai , atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan .

Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut sebagai kreditur, menjelaskan bahwa Penanganan debitur wanprestasi pada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut dibagi menjadi beberapa tahap yakni sebagai berikut:²

a. Penanganan dengan pendekatan persuasif

Menggunakan pendekatan persuasif dengan cara menerapkan prinsip kekeluargaan dimana nasabah (debitur) diberikan kesempatan atau waktu untuk melunasi hutangnya. Cara ini merupakan langkah awal atau pertama yang diberikan Bank kepada debitur sebagai bentuk penanganan Bank dalam menyelamatkan perjanjian kredit yang telah dicerai. Namun dalam hal ini ternyata si debitur masih tetap tidak membayarkan hutangnya kepada kreditur. Sehingga Bank melakukan upaya penanganan kredit lanjutan.

² Hasil Wawancara kepada PD.BPR Bank Daerah Tulungagung Kantor Kas Ngunut pada tanggal 14 april 2018 pukul 09.00 wib

- b. Penanganan kredit bermasalah menurut prosedur hukum perbankan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia no. 26/4/bppp tanggal 19 mei 1993 . Bank menerapkan upaya lain yakni dengan Menggunakan prinsip penyelamatan kredit bermasalah menggunakan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*)

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak; misalkan dalam perkara ini nasabah yang telah dinyatakan kolek atau telah mencederai prestasinya untuk membayarkan hutangnya diberikan surat pemberitahuan untuk datang ke Bank dan melakukan penjadwalan kembali dengan cara menawarkan kepada nasabah atau debitur untuk mengubah tanggal pembayaran angsurannya yang semula pembayaran dilakukan sebulan sekali menjadi tiga bulan sekali.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan Bank; dalam hal ini debitur diberikan penawaran kembali oleh Bank mengenai penambahan syarat-syarat yang semula hanya mengenai perjanjian hutang dan jaminan namun

ditambahkan kembali dengan menyertakan surat pernyataan untuk segera membayarkan hutangnya yang telah jatuh tempo.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana Bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Tiga cara penyelamatan kredit tersebut diterapkan oleh Bank sebagai upaya Bank agar si debitur dapat melakukan pembayaran hutangnya. Namun pada kenyataannya si debitur masih belum bisa membayarkan hutangnya. Sehingga tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Bank. Karena debitur tidak ada itikad baik untuk segera membayarkan angsuran hutangnya, Bank dengan terpaksa melakukan tindakan yang diperbolehkan oleh undang-undang yakni dengan melakukan proses sita jaminan dan melakukan pelelangan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah.

- c. Penanganan kredit bermasalah dalam hal ini merupakan upaya penyelesaian kredit macet sesuai dengan ketentuan eksekusi jaminan pada pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 jaminan fidusia.

Hal ini merupakan penanganan terakhir yang selalu dilakukan oleh kreditur untuk menghindari timbulnya kerugian yang ditanggung oleh pihak kreditur, dengan menggunakan penerapan undang-undang jaminan fidusia terkait langkah terakhir ini dengan melakukan penjualan dan pelelangan

umum ke Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta eksekusi jaminan fidusia.

Menurut Pasal 20 undang-undang nomor 42 tahun 1999 bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas barang persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Berdasarkan Asas *droit de suite* yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun maka pihak Bank bisa mengeksekusi benda jaminan sekalipun itu adalah barang *inventory*. Untuk eksekusi Tetap tunduk berdasarkan pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang berbunyi :

- 1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan

cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

- d. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam prakteknya ada beberapa tahapan yang dilakukan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut dalam melaksanakan upaya penanganan dengan cara terakhir ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemberian surat peringatan pertama terlebih dahulu kepada debitur melewati kantor pos ,
2. Kemudian tidak ada tanggapan dari pihak debitur, maka pihak Bank mengirim kembali surat peringatan kedua dan berlanjut ke surat peringatan ketiga, dan masih tidak ada tanggapan dari debitur maka Bank segera menindak lanjuti hal tersebut. Bank melakukan tindakan dengan melakukan pelaporan dan pendaftaran ke Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang pada saat itu berada di Kota Kediri .

3. Dalam pendaftaran ke Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pihak Bank harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yakni sebagai berikut:

- 1) Pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan.
- 2) KPKNL/Balai Lelang Swasta melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lelang, yaitu namun tidak terbatas pada Perjanjian Kredit, Sertipikat fidusia, Bukti perincian utang jumlah debitur, bukti peringatan wanprestasi kepada debitur, bukti kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur;
- 3) Setelah dokumen tersebut di atas dianggap lengkap, maka KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada Bank;
- 4) Bank melakukan Pengumuman Lelang. Jika barang yang dilelang adalah barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, maka pengumuman dilakukan sebanyak 2 kali, berselang 15 hari. Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui pengumuman tempelan yang dapat dibaca oleh umum atau melalui surat kabar harian.

Tetapi pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan lelang.

Dari beberapa persyaratan tersebut Bank mengirimkan beberapa surat pemberitahuan yang mana Dengan rinciannya sebagai berikut:

4. DATA SURAT PEMBERITAHUAN TAHUN 2009

Nomor	SP Nomor	KETERANGAN
1	SURAT PEMBETAHUAN NO. 576.1 / SP / 2009 TANGGAL 3 NOVEMBER 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan SP3 tgl 20 agustus 2009 • Telah didaftarkan ke KPKNL Kediri pada tgl 16 okt 2009 • Catatan : <ul style="list-style-type: none"> - terbit surat dari KPKNL Kediri tgl 21 oktober 2009 no s- 1650 / wkn.10/knl.02 / 2009 - Penetapan hari lelang - Berdasarkan surat no. 548, / SP / 2009 tanggal 16 oktober 2009 maka permohonan lelang angunan yang dilaksanakan pada - hari dan tgl = jum.at 04 desember 2009 - waktu jam 10 wib - tempat lelang : kantor PT. BPR Kota Tulungagungjl PB sudirman NO 58. Tulungagung - Pengumuman Pelaksanaan Lelang Di Surat Kabar <ol style="list-style-type: none"> 1. lelang I (pertama) tanggal 3 nov 2009 2. lelang II (kedua) tanggal 19 nov 2009
2	PEMBERITAHUAN NO 589 / SP /2009 TANGGAL	<ul style="list-style-type: none"> - telah didaftarkan di KPKNL - pemberitahuan limit harga lelang

	10 NOVEMBER 2009	Rp XXXX - diperuntukan untuk membayar kewajiban kredit atas nama XXX
3	PEMBERITAHUAN LELANG KEDUA NO 616.2. / SP / 2009 TANGGAL 2 DES 2009	- tanggal 19 Nov 2009 dan ralat pengumuman tgl 2 Des 2009 - telah dilakukan pengumuman di surat kabar radar bromo

Sumber data dari PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas

Ngunut



5. PADA TAHUN 2010

NOMOR	SP NOMOR	KETERANGAN
1	SURAT PEMBERITAHUAN PEMBELIAN AGUNAN NOMOR 85 / 5PB / 2010 TGL 2 MARET 2010	- Berdasarkan surat no. 589 / SP / 2010 tgl 10 November 2010 Pemberitahuan pelaksanaan lelang tersebut tidak terdapat peserta lelang yang minat sesuai dengan harga limit lelang sebesar Rp xxxx menjadi tertunda Dengan alasan membantu mempercepat penyelesaian maka diambil langkah pembelian anggunan oleh Bank dengan harga sebesar Rp xxx
2	SURAT PEMBERITAHUAN PENGUMUMAN LELANG PERTAMA NOMOR 352.1 / SP / 2010 TANGGAL 31 AGUSTUS 2010	- Menindaklanjuti surat PD. BPR Kota Tulungagung tanggal 20 agustus 2009 tentang peringatan III bahwa anggunan berupa barang inventory menjadi jaminan kredit atas nama xxxx telah di daftarkan ke KPKNL Kediri pada tanggal 02 agustus 2010 bedasarkan bedasarkan dengan nomor surat 306 / SP / 2010 dan telah disetujui untuk dilaksanakan lelang pada tanggal 30 september 2010 bedasarkan surat KPKNL NO S-1446 MKN.10 / KNL.02 / 2010 - Bank menerbitkan pengumuman pertama pada tanggal 30 agustus 2010 surat kabar tidak disebutkan
3	SURAT PEMBERITAHUAN PENGUMUMAN LELANG KEDUA NO. 369.3/ SP / 2010 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2010	- Menindaklanjuti SP 3 telah didaftarkan kembali pada kantor KPKNL pada tanggal 2 agustus 2010 dengan no 306 / SP / 2010 - Telah mendapatkan persetujuan untuk dilaksanakan lelang pada

		<p>tanggal 30 september 2010 berdasarkan surat KPKNL no s-1446 / WKN / 10 /KNL .02 / 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah diterbitkan di radar bromo (jawa pos) tanggal 15 september 2010
4	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PENGUMUMAN LELANG PERTAMA NO . 395.2 / SP / 2010 TANGGAL 5 OKTOBER 2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti sp III telah di daftarkan ke KPKNL Kediri pada tgl 4 oktober 2010 dengan nomor surat 391 / SP / 2010 - Mendapat persetujuan untuk dilaksnakan lelang pada tanggal 5 November 2010 bedasarkan surat pemetaan KPKNL nomor 3-1618/ WKN.10 / KNL .2 / 2010 pada tanggal 4 oktober 2010 - Pada surat pemberitahuan no 616.2/ SP/ 2009 berdasarkan surat tersebut maka telah didapatkan pemberitahuan pelaksanaan lelang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 4 desember 2009 , - Pelaksanaan lelang Tempat = kantor KPKNL Kediri Waktu = 4.00 WIB Tanggal = 5 november 2010
5	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN LELANG NOMOR 430.2/SP/2010 TANGGAL 29 OKTOBER 2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diberitahukan bahwa akan dilaksanakan lelang pada tanggal 5 nopember 2010 pukul 9.00 wib tempat kantor KPKNL Kediri
6	<p>SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PELAKSAAN LELANG NOMOR 499 / SP /2011 TGL 5 JANUARI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Merujuk pada surat nomor : 430.2/ SP / 2010 Tanggal 29 oktober 2010 telah dilakasnakan lelang pada : - Hari : jum.at - Tanggal : 5 november 2010

		<ul style="list-style-type: none"> - Pukul : 9.00 WIB - Tempat : kantor KPKNL Kediri jlan raya pondok jati , blok AI nomor 3 – 4 Kediri, - Dimenangkan oleh sdr, Moh. XXX karyawan swasta, bumi suko indah A2 – 08 Kediri dengan Harga Rp xxxxx
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber data dari PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut

Menurut kepala PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut yang menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan lelang dan melakukan proses penjualan tersebut maka pihak kreditur segera melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Obyek jaminan tersebut adalah satu unit kendaraan bermotor roda empat merek toyota dan sejumlah barang persediaan dengan nilai sesuai yang diperjanjikan, namun masalah muncul ketika barang persediaan tersebut beberapa berada dalam penguasaan orang lain karena barang tersebut berwujud alat dan beberapa produk jadi yang bisa diprjualbelikan. Kreditur tetap meminta haknya untuk sejumlah barang yang telah diperjanjikan, selanjutnya debitur harus menyerahkan barang-barang persediaan tersebut untuk memenuhi hutangnya dengan bagaimanapun caranya. Namun berbagai alasan dari debitur untuk tidak menyerahkan obyek yang telah berpindah tangan tersebut.³

Menurut wawancara peneliti dengan debitur, menjelaskan bahwa memang benar debitur memiliki hutang dengan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten

³ Hasil Wawancara kepada PD.BPR Bank Daerah Tulungagung Kantor Kas Ngunut pada tanggal 14 april 2018 pukul 09.00 wib

Tulungagung Kantor Kas Ngunut dengan obyek jaminan fidusia berupa barang *inventory*. Barang jaminan tersebut berupa sejumlah perlengkapan serta peralatan dan barang produksi dari sebuah optik miliknya dengan beberapa ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Namun saat proses eksekusi jaminan tersebut barang tersebut beberapa telah dijualnya kepada orang lain padahal telah diketahuinya bahwa barang tersebut merupakan obyek jaminan hutangnya. Pada saat proses eksekusi debitur enggan menyerahkan barang persediaan tersebut karena masih memerlukannya sebagai matapencariannya. Pada akhirnya Bank memberikan kesempatan kepada debitur agar memenuhi atau melengkapi nilai barang sesuai yang diperjanjikan atau menggantikan obyek jaminan tersebut dengan obyek lain, kemudian debitur menyetujuinya dengan menggantikan barang *inventory* yang telah berpindah tangan. Benda yang dipakai sebagai ganti barang yang telah berpindah tangan berupa satu unit kendaraan roda dua merek honda yang nilainya senilai dengan obyek tersebut namun belum diserahkan kepada pihak kreditur.⁴

Menurut keterangan kepala PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut benda pengganti sebagai obyek jaminan hingga saat ini masih belum diserahkan oleh pihak debitur. Sedangkan bank telah beberapa kali meminta pelunasan atas piutang yang sebagian belum diselesaikan oleh pihak debitur. Bank

⁴ Hasil wawancara kepada debitur PD.BPR Bank Daerah Tulungagung Kantor Kas Ngunut pada tanggal 18 mei 2018 pukul 09.00 wib

melakukan penelusuran terhadap debitur selama beberapa waktu namun ternyata debitur telah berpindah alamat.⁵



⁵ Hasil wawancara kepada kepala PD.BPR Bank Daerah Tulungagung Kantor Kas Ngunut pada tanggal 12 juni 2018 pukul 11.00 wib

C. Hambatan-hambatan dan Upaya di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut Dalam Proses Eksekusi Sita Jaminan Dan Penjualan Obyek Sita Jaminan

- a. Hambatan-hambatan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut Dalam Proses Eksekusi Sita Jaminan dan Penjualan Obyek Sita Jaminan.

Hambatan-hambatan yang ditemui oleh pihak kreditur terkait dengan proses eksekusi sebagai berikut:

hambatan ini merupakan suatu kesulitan yang diperoleh pihak eksekutor dalam mengeksekusi obyek dimana karena adanya

- 1) Debitur melakukan perlawanan saat proses sita jaminan dengan melakukan aksi bersama beberapa orang lainnya untuk menghadang para pihak eksekutor.
- 2) Pada saat eksekusi barang *inventory* sebagian telah dipindah tangankan dengan cara dijual oleh debitur sehingga pihak eksekutor hanya mengeksekusi barang yang tersisa dan selanjutnya benda penggantinya dieksekusi selang beberapa hari kemudian. Namun pada saat eksekusi kedua, obyek pengganti jaminan tidak ada.
- 3) Debitur melakukan penggantian kunci pagar sehingga pihak eksekutor tidak dapat mengeksekusi jaminan. Sehingga terpaksa pihak eksekutor melakukan pengrusakan kunci agar benda inventori yang ada didalam toko dapat dikeluarkan.

- 4) Adanya perlawanan hukum yang dilakukan oleh pihak debitur dengan dasar pengrusakan barang yang dilakukan eksekutor. Sehingga proses sita jaminan menjadi terhambat.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat yang diperoleh dari luar diantaranya adalah

- 1) faktor letak debitur dan kreditur yang sering menghambat proses eksekusi dimana wilayah kecamatan ngunut merupakan wilayah kabupaten tulungagung yang berada di perbatasan antara kota blitar dan kabupaten tulungagung sehingga proses eksekusi sita jaminan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu karena letak yang berjauhan membuat terkendala akomodasi dan transportasi.
- 2) Faktor cuaca yang sering sekali didapati oleh pihak eksekutor dalam melaksanakan sita jaminan, karena di daerah tersebut memiliki intensitas curah hujan yang cukup tinggi.
- 3) Adanya beberapa pihak luar yang membantu debitur untuk melakukan penghadangan pihak eksekutor, karena merasa benda jaminan masih dalam penguasaan si debitur.

b. Upaya PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut
Dalam Proses Eksekusi Sita Jaminan Dan Penjualan Obyek Sita Jaminan

Upaya-upaya yang telah diterapkan pihak Bank dalam menyelesaikan proses eksekusi mengingat adanya berbagai hambatan yang didapat maka Bank melakukan beberapa tindakan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dalam upaya menghadapi pihak debitur yang melakukan perlawanan pada saat proses eksekusi dan tidak menyetujui adanya sita jaminan maka pihak eksekutor dalam hal ini perwakilan dari PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut melakukan eksekusi dengan didampingi pihak kuasa hukum dalam hal ini kejaksaan serta pihak kepolisian. Pihak kejaksaan sendiri merupakan kuasa hukum yang ditunjuk oleh Bank untuk menjadi kuasa hukumnya serta saat proses eksekusi pihak kejaksaan bertugas menyampaikan isi putusan dan titel eksekutorial dari KPKNL. Sedangkan pihak kepolisian sendiri bertugas mengamankan berbagai keadaan yang akan terjadi di tempat dimana dilaksanakan eksekusi jaminan.
- 2) Dalam upaya mengatasi barang *inventory* yang telah berpindah tangan sebelumnya kepada pihak lain maka pihak eksekutor melakukan eksekusi lanjutan untuk mendapatkan obyek jaminan yang telah diganti dengan obyek lain. Pihak kreditur berhak meminta pemenuhan prestasi dari debitur berdasarkan undang-undang.

- 3) Upaya selanjutnya adalah karena adanya penggantian kunci pagar yang mengakibatkan pihak eksekutor tidak dapat mengeksekusi barang jaminan maka pihak eksekutor meminta kunci pengganti kepada pihak debitur namun enggan untuk menyerahkannya. Pada akhirnya pihak eksekutor melakukan pembobolan kunci agar barang dapat segera dieksekusi.
- 4) Melakukan eksekusi jaminan berdasarkan titel eksekutorial dari KPKNL sehingga apabila ada perlawanan hukum yang saat itu dilakukan oleh debitur maka pihak Bank memiliki dasar dan kekuatan hukum yang sah dan tidak dapat diganggu gugat.
- 5) Dalam mengatasi hambatan yakni karena letak yang berjauhan antara kantor PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut dengan nasabah maka pihak Bank memfasilitasi para pihak eksekutor dengan kendaraan roda empat yang bisa digunakan saat proses eksekusi.
- 6) Karena cuaca yang sering hujan maka pihak Bank melakukan upaya dengan cara melakukan eksekusi dengan kendaraan roda empat dan kendaraan pengangkut barang yang tertutup sehingga pihak eksekutor dan barang eksekusi tidak basah karena hujan.
- 7) Dalam upaya menghadapi para pihak yang tidak menyetujui adanya sita jaminan maka pihak eksekutor dalam hal ini perwakilan dari PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut melakukan eksekusi dengan didampingi pihak kuasa hukum dalam hal ini Kejaksaan

serta pihak kepolisian. Pihak kejaksaan sendiri merupakan kuasa hukum yang ditunjuk oleh Bank untuk menjadi kuasa hukumnya serta saat proses eksekusi pihak kejaksaan bertugas menyampaikan isi putusan dan titel eksekutorial dari KPKNL. Sedangkan pihak kepolisian sendiri bertugas mengamankan berbagai keadaan yang akan terjadi di tempat dimana dilaksanakan eksekusi jaminan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penanganan Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Barang Persediaan (*Inventory*) di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut. Penanganan debitur wanprestasi pada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut dibagi menjadi beberapa tahap yakni sebagai berikut, Pertama penanganan dengan pendekatan persuasif menggunakan pendekatan persuasif dengan cara menerapkan prinsip kekeluargaan dimana nasabah (debitur) diberikan kesempatan atau waktu untuk melunasi hutangnya. Kedua Penanganan kredit bermasalah menurut prosedur hukum perbankan yakni sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia no. 26/4/bppp tanggal 19 mei 1993 . Bank menerapkan upaya lain yakni dengan Menggunakan prinsip penyelamatan kredit bermasalah menggunakan 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*). Ketiga Bank dengan terpaksa melakukan tindakan yang diperbolehkan oleh undang-undang yakni dengan melakukan proses sita jaminan dan melakukan pelelangan. Terakhir Penanganan dengan eksekusi jaminan menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999 jaminan fidusia.

2. Hambatan-hambatan dan Upaya di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut Dalam Proses Eksekusi Sita Jaminan Dan Penjualan Obyek Sita Jaminan.

hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut yakni sebagai berikut yakni dalam mengatasi hambatan karena menghadapi pihak debitur yang melakukan perlawanan pada saat proses eksekusi dan tidak menyetujui adanya sita jaminan maka pihak eksekutor dalam hal ini perwakilan dari PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut melakukan eksekusi dengan didampingi pihak kuasa hukum dalam hal ini kejaksaan serta pihak kepolisian. Selanjutnya barang *inventory* yang telah berpindah tangan sebelumnya kepada pihak lain maka pihak eksekutor melakukan eksekusi lanjutan untuk mendapatkan obyek jaminan yang telah diganti dengan obyek lain. Upaya selanjutnya adalah karena adanya penggantian kunci pagar yang mengakibatkan pihak eksekutor tidak dapat mengeksekusi barang jaminan maka pihak eksekutor meminta kunci pengganti kepada pihak debitur dan pihak eksekutor melakukan pembobolan kunci agar barang dapat segera dieksekusi. Melakukan eksekusi jaminan berdasarkan titel eksekutorial dari KPKNL sehingga apabila ada perlawanan hukum yang saat itu dilakukan oleh debitur maka pihak Bank memiliki dasar dan kekuatan hukum yang sah . Dalam mengatasi hambatan yakni karena letak yang berjauhan antara kantor PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung

Kantor Kas Ngunut dengan nasabah maka pihak Bank memfasilitasi para pihak eksekutor dengan kendaraan roda empat yang bisa digunakan saat proses eksekusi. Karena cuaca yang sering hujan maka pihak Bank melakukan upaya dengan cara melakukan eksekusi dengan kendaraan roda empat dan kendaraan pengangkut barang yang tertutup sehingga pihak eksekutor dan barang eksekusi tidak basah karena hujan. Serta dalam upaya menghadapi para pihak yang tidak menyetujui adanya sita jaminan maka pihak eksekutor dalam hal ini perwakilan dari PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut melakukan eksekusi dengan didampingi pihak kuasa hukum dalam hal ini Kejaksaan serta pihak kepolisian dan menyampaikan isi putusan dan titel eksekutorial dari KPKNL. Sedangkan pihak kepolisian sendiri bertugas mengamankan berbagai keadaan yang akan terjadi di tempat dimana dilaksanakan eksekusi jaminan.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi kreditur yakni Bank ada beberapa masukan atau saran yakni sebagai berikut:
 - a. pihak Bank lebih selektif kembali dalam melakukan perjanjian kredit dengan debitur

- b. pihak Bank harus menelusuri lebih dahulu keterangan dari debitur sebelum melakukan perjanjian kredit dengan debitur
- c. Bank seharusnya mengoptimalkan petugas dan karyawannya dalam menyelesaikan sengketa dengan debitur yang melakukan wanprestasi
- d. Bank seharusnya melakukan investigasi terkait dengan usaha apa yang sedang dijalankan oleh calon debitur. Hal ini sangat penting karena menyangkut dengan kapasitas calon debitur dalam melakukan pembayaran hutang kepada Bank.
- e. Bank seharusnya menambah karyawannya terutama karyawan yang bertugas di lapangan untuk mengawasi dan menyelidiki debitur yang melakukan wanprestasi. Hal tersebut harus dilakukan mengingat kurangnya sumber daya manusia di Bank tersebut.

2. Bagi debitur dan calon debitur lainnya

- a. Seharusnya debitur dan calon debitur sebelum mengajukan pinjaman kepada Bank harus melihat kemampuan diri sendiri dalam hal pembayaran, sanggup atau tidaknya dalam memenuhi semua hutang yang akan diperjanjikan kepada Bank sebagai krediturnya.
- b. Seharusnya debitur dan calon debitur melakukan perjanjian kredit atau mengajukan pinjaman kepada Bank sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dalam pembayarannya.

- c. Seharusnya debitur yang telah dikategorikan dalam debitur kolek atau wanprestasi tetap membayarkan angsuran pembayaran sekalipun jumlahnya tidak sama dengan yang telah diperjanjikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa debitur dianggap telah melakukan itikad baik dalam melakukan pembayaran angsuran. Sehingga Bank masih bisa mentoleransi debitur.
3. Bagi masyarakat
- a. Masyarakat lainnya dalam kasus tersebut seharusnya tidak ikut campur dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan yang telah dilakukan oleh pihak eksekutor.
 - b. Masyarakat seharusnya melihat kembali dampak yang ditimbulkan akibat adanya debitur wanprestasi, dimana obyek jaminan harus disita oleh Bank dan berpindah tangan ke pihak Bank sebagai akibat tersebut.
 - c. Masyarakat lainnya seharusnya tidak melakukan wanprestasi dalam setiap perikatan yang dibuatnya entah kedudukannya sebagai debitur maupun kreditur. Masyarakat harus tetap melakukan prestasinya dan memenuhi seluruh prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Ristono, **Manajemen Persediaan**, edisi 1. Yogyakarta .Graha Ilmu. .2009.
- Arman Hakim Nasution, dan Yudha Prasetyawan, **Perencanaan Dan Pengendalian Produksi**,: Surabaya, Guna Widya, 2008.
- Buku Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015.
- Eugenia Liliawati Muljono, **Tinjauan Yuridis Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh PerBankan** , Jakarta, Harvaindo, 2003
- Freddy, Rangkuti. **Manajemen Persediaan Aplikasi di Bidang Bisnis**. Jakarta, PT. Raja grafindo Persada, 2007
- Hermansyah, **Edisi Revisi Hukum PerBankan Nasional Indonesia** , Jakarta.Kencana Prenada Media Group, 2009,
- Hermansyah, **Edisi Revisi Hukum PerBankan Nasional Indonesia**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- A. Satrio, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, , **Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern**, Bandung, PT Refika Aditama, 2004.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Manullang, E.Fernando., , **Menggapai Hukum Berkeadilan**, Jakarta ,Penerbit Kompas. 2007
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana, 2005.
- R Setiawan, **Pokok Pokok Hukum Perikatan**, Putra Abardin, Bandung, 1999.
- R.Subekti, **Hukum Perjanjian** Cet.ke-II,Jakarta, Pembimbing Masa, 1970.
- Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum PerBankan Di Indonesia** ,Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Salim HS, , **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Cet.V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2011

Soerjono soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta ,UI-Press, , 2010.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Cet XXI, Jakarta, PT. Intermasa, 2005.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal hukum suatu pengantar**, ed.ke-3 cet.ke-1. Yogyakarta, Liberty. 2007

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007) Suwanto, Erlina Dayanti, Pembangunan Database Terpadu Brbasis Web Untuk Menyediakan Informasi Debitur Bagi PD. BPR/PK Sekabupaten Indramayu, Jurnal Online ICT- STMIK IKMI Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011.

1) JURNAL DAN ON LINE

Arini Faradinna.jurnal. **Perbandingan Kegiatan Sewa Guna Usaha Dan Pembiayaan Konsumen(Analisis Contoh Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Di Pt.Bca Finance Dikaitkan Dengan Pengaturan Mengenai Jaminan Fidusia)**, skripsi, fakultas hukum universitas Indonesia, Jakarta 2013

Dikutip dari *e-jurnal* <http://digilib.unila.ac.id/8270/3/BAB%202.pdf> diakses 13 januari 2018 pukul 9.00 wib